

CASCADING ASISTEN

SEKRETARIAS DAERAH	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Indikator	IKM
	Nilai LPPD
	Indek Pelayanan Publik

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah
Indikator	Persentase pengelolaan pemerintahan umum
	persentase penyelenggaraan pelayanan umum

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
Sasaran	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan
Indikator	Indeks kelembagaan Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan

CASCADING STAF AHLI WALIKOTA

SEKRETARIAS DAERAH	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Indikator	IKM
	Nilai LPPD
	Indek Pelayanan Publik

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Pemerintahan
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang Pemerintahan yang disampaikan kepada Walikota
Sasaran	Meningkatnya Kualitas kebijakan Walikota dibidang hukum
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang hukum yang disampaikan kepada Walikota
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Politik
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang politik yang disampaikan kepada Walikota

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang kemasyarakatan
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang kemasyarakatan yang disampaikan kepada Walikota
Sasaran	Meningkatnya Kualitas kebijakan Walikota dibidang sumber daya manusia
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang sumber daya manusia yang disampaikan kepada Walikota

STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Ekonomi
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang Ekonomi yang disampaikan kepada Walikota
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang Keuangan
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang keuangan yang disampaikan kepada Walikota
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang pembangunan
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang pembangunan yang disampaikan kepada Walikota

SEKRETARIAS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 1.326.862.300,-

CASCADING BAGIAN PEMERINTAHAN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah	
Indikator	Persentase pengelolaan pemerintahan umum	
	persentase penyelenggaraan pelayanan umum	

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN		
Sasaran	Meningkatnya Pembinaan dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam kategori baik	
	Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	
	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	
Sasaran	Optimalnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	
Indikator	Persentase dokumen kerjasama yang sesuai dengan pedoman	
Sasaran	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan tepat waktu	
Kegiatan	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 1.299.974.630
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp . 26.887.670,-

SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN UMUM		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	
Indikator	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	
	Persentase penyelenggaraan kelurahan dalam kategori baik	
Sasaran	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	
Indikator	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang berkualitas	
Sub Kegiatan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 624.828.550

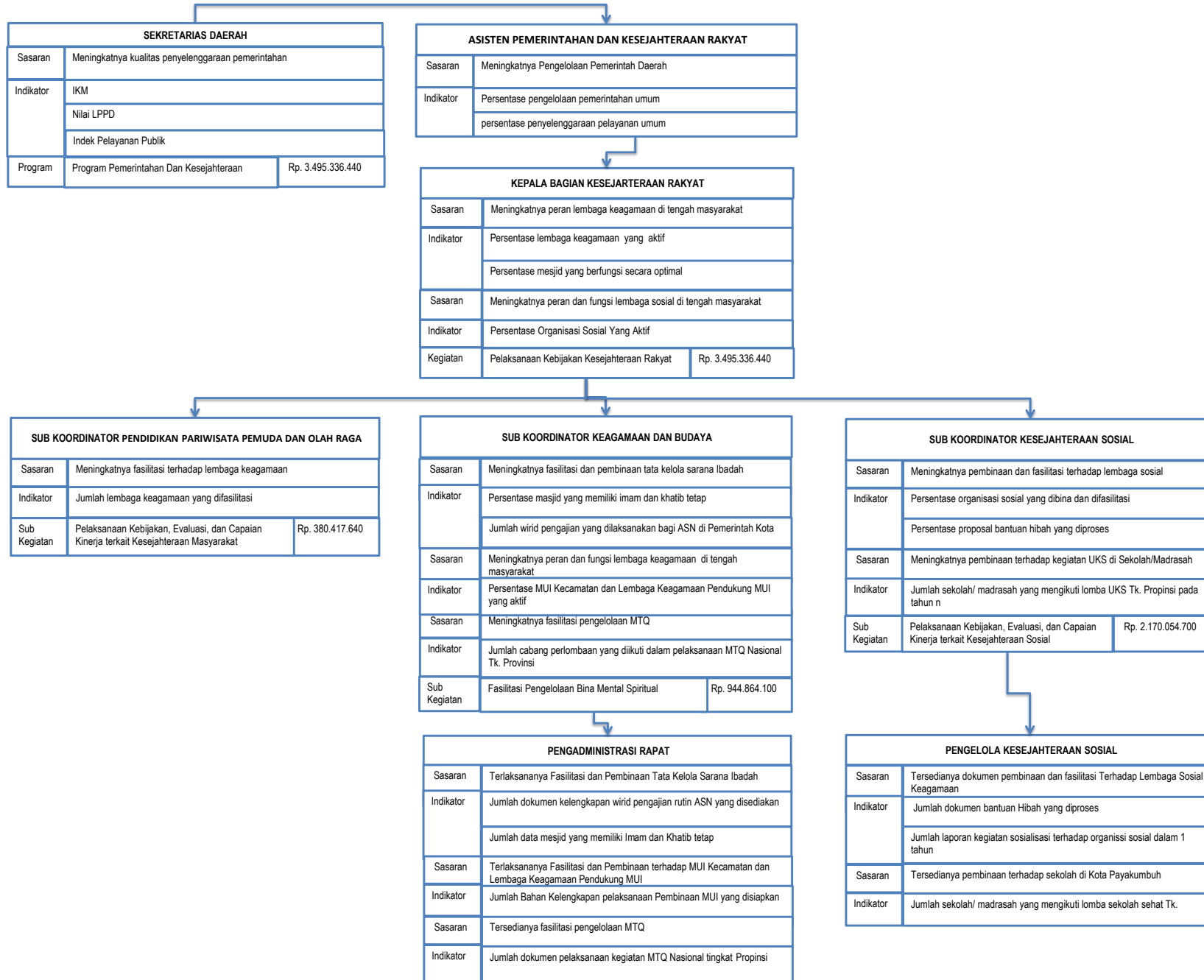
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN WILAYAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas data rupa bumi	
Indikator	Persentase data rupabumi yang di inventarisir	
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian permasalahan tapal batas	
Indikator	Persentase permasalahan tapal batas yang terselesaikan	
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	
Indikator	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 326.727.930

PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
Sasaran	Terlaksananya pendataan rupabumi Kota Payakumbuh	
Indikator	Jumlah dokumen data rupabumi yang tersedia	
Sasaran	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan kec & kelurahan	
Indikator	Jumlah koordinasi dalam rangka pembinaan kec & kelurahan	
Sasaran	Terlaksananya pendataan batas wilayah	
Indikator	Jumlah dokumen batas wilayah yang tersedia	

SUB KOORDINATOR OTONOMI DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas dokumen kerjasama yang difasilitasi	
Indikator	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan tepat waktu	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 348.418.150
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 19.933.320
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 6.954.350

ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH		
Sasaran	Tersedianya dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
Indikator	Jumlah bahan LKPJ yang di himpun dari Perangkat Daerah	
	Jumlah bahan LPPD yang di himpun dari Perangkat Daerah	
	Jumlah bahan SPM yang di himpun dari Perangkat Daerah	

CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



CASCADING BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 636.999.730

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah	
Indikator	Persentase pengelolaan pemerintahan umum	
	persentase penyelenggaraan pelayanan umum	

KEPALA BAGIAN HUKUM		
Sasaran	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	
	Persentase Perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	
	Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke	
	Indek Reformasi Hukum	
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 636.999.730

SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI HUKUM		
Sasaran	Meningkatnya publikasi peraturan perundang-undangan	
Indikator	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan melalui JDIH	
Sasaran	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang produk hukum yang dihasilkan	
Indikator	Jumlah sosialisasi hukum dan peraturan Perundang- undangan	
	Jumlah pembuatan lembaran daerah, berita daerah, dan panduan hukum	
Sub Kegiatan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 125.866.150

SUB KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN		
Sasaran	Meningkatnya kualitas Perundang-Undangan Daerah	
Indikator	Persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi	
	Jumlah ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun n	
	Jumlah perda yang dibahas di DPRD	
	Jumlah produk hukum yang ditetapkan : Perda, Perwako dan Keputusan Walikota dan Keputusan Sekretaris Daerah	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 108.416.350

SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM		
Sasaran	Meningkatnya koordinasi penyelesaian masalah hukum	
Indikator	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti terkait masalah hukum	
Sasaran	Meningkatnya penyelesaian masalah hukum	
Indikator	Jumlah rencana aksi penyelesaian masalah hukum yang ditindaklanjuti	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 445.688.890

PENGELOLA BANTUAN HUKUM		
Sasaran	Tersedianya bahan laporan di bidang bantuan hukum	
Indikator	Jumlah laporan rencana aksi bantuan hukum yang di buat	
	Jumlah laporan kerjasama masalah hukum yang disusun	
	Jumlah bahan untuk bantuan hukum yang disiapkan	

CASCADING BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 10.557.803.414

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan	
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh	

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		
Sasaran	Meningkatkan kualitas perencanaan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh	
Indikator	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	
	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	
	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	
Indikator	IKM Sekretariat Daerah	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 130.090.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.497.492.100

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
Sasaran	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	
Indikator	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan perundang-undangan yang berlaku	
	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu	
Sasaran	Meningkatnya kualitas Dokumen Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	
Indikator	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp. 53.691.650
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 76.398.550
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.937.323.100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 560.169.000

SUB KOORDINATOR KEUANGAN		
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	
Indikator	Persentase kesesuaian penatausahaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Sasaran	Meningkatnya realisasi keuangan perangkat daerah	
Indikator	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah	
Indikator	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN		
Sasaran	Terlaksananya Pengumpulan dan Peny. Dokumen Pelayanan Publik	
Indikator	Jumlah bahan SPIP yang dikumpulkan	
	Jumlah bahan yang dikumpulkan untuk penyusunan SOP dan IKM	

BENDAHARA		
Sasaran	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan keuangan	
Indikator	Jumlah SPP yang diajukan ke pengguna anggaran	
	Jumlah SP2D yang diselesaikan ke Bank	
	Jumlah dokumen pembayaran yang dilakukan	
	Jumlah laporan pajak yang disampaikan	
	Jumlah buku kas umum dan CMS yang diverifikasi	
	Jumlah STS yg disetorkan ke Penerimaan Daerah	
	Jumlah laporan pj penerimaan yg disiapkan	
	Jumlah BKU penerimaan yg disusun	
	Jumlah laporan yang direkap	

VERIFIKATOR KEUANGAN		
Sasaran	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan keuangan	
Indikator	Jumlah SPJ dan pajak yang diverifikasi	
	Jumlah belanja dan aliran kas yang dicatat dan disesuaikan	
	Jumlah SPJ yang disahkan	

PENGADMINISTRASI KEUANGAN		
Sasaran	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan keuangan	
Indikator	Jumlah BKU manual yang dientri dari BP & BPP	
	Jumlah SP2D yang dientri dari BP & BPP	
	Jumlah Pajak yang dientri dari BP & BPP	
	Jumlah laporan fungsional manual yang dibuat	
	Jumlah aliran kas dan GU manual yang dibuat	

PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN		
Sasaran	Terlaksananya pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	
Indikator	Jumlah SPP, SPM, UP, GU, LS dan TU yang dibuat	
	Jumlah SP2D, transaksi Belanja dan pajak yang dibukukan	
	Jumlah transaksi belanja dan pajak yang dientrykan	
	Jumlah lap. Pertanggung jawaban adm system yang dibuat	
	Jumlah register SPP, SPM dan SP2D yang dibuat	
	Jumlah aliran kas yang dibuat	
	Jumlah lap. rekonsiliasi pendapatan dan SP2D bulanan yang dibuat	
	Jumlah data belanja UP/GU/TU dan pengembalian belanja yang	
	Jumlah laporan realisasi anggaran yang dicetak	
	Jumlah lap. Pertanggung jawaban akuntansi yang disusun	
	Jumlah dok. LPJUP yang dibuat untuk kelengkapan GU	
	Jumlah laporan keuangan yg disiapkan	

CASCADING BAGIAN PEREKONOMIAN

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 183.431.990,-

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN		
Sasaran	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perekonomian Daerah	
Indikator	Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi (4K)	
	Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	
	Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	
Sasaran	Meningkatnya koordinasi pembentukan dan pembinaan BUMD dan BLUD	
Indikator	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 173.432.540
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 9.999.450

SUB KOORDINATOR BINA PRODUKSI DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi	
Indikator	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	
Sasaran	Meningkatnya pemanfaatan data produksi daerah oleh stakeholder terkait	
Indikator	Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah	
Sasaran	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian	
Indikator	Jumlah rekomendasi strategi pengendalian inflasi (4K) yang ditindaklanjuti	
Sub Kegiatan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 89.919.250

SUB KOORDINATOR SARANA DAN KELEMBAGAAN		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi pertambangan dan energi	
Indikator	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 9.999.450

SUB KOORDINATOR BINA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pembinaan BUMD dan BLUD	
Indikator	Jumlah BUMD dan BLUD yang dibina	
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 77.999.600

ANALIS PEREKONOMIAN	
Sasaran	Tersedianya dokumen pembinaan BUMD dan BLUD
Indikator	Jumlah dokumen pembinaan BUMD yang disiapkan
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring BUMD dan BLUD yang disiapkan

CASCADING BAGIAN PBJ DAN DALBANG

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 421.322.440

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan	
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh	

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		
Sasaran	Meningkatnya transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan	
Indikator	Persentase capaian realisasi fisik kegiatan	
	Persentase capaian realisasi keuangan	
	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	
Kegiatan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 62.563.940
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 358.758.500

SUB KOORDINATOR MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		
Sasaran	Meningkatnya monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pembangunan	
Indikator	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 62.563.940

PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA		
Sasaran	Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan Kota Payakumbuh	
Indikator	Jumlah laporan bulanan kegiatan Perangkat Daerah yang di himpun	
Sasaran	Terlaksananya rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Indikator	Jumlah rapat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan PD	

SUB KOORDINATOR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang/jasa yang berbasis elektronik	
Indikator	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 150.888.600

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		
Sasaran	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
Indikator	Jumlah server Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan perangkat penunjang lainnya yang dipastikan aktif 24 jam.	
	Jumlah permasalahan teknis terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terselesaikan	
	Jumlah Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terfasilitasi	

PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA		
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang terkoordinir melalui UKPBJ	
Indikator	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah	
	Jumlah dokumen pemilihan penyedia Barang/ jasa Pemerintah	
	Jumlah dokumen pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa	
	Jumlah dokumen pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara Swakelola	

KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang/ jasa yang terakomodir melalui	
Indikator	Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	
	Persentase pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui UKPBJ	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 72.221.700
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 135.648.200

PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang /Jasa yang terkoordinir melalui UKPBJ	
Indikator	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pada RUP Kota Payakumbuh yang dikelola	
	Jumlah pendampingan konsultasi Bimtek PBJ yang dilaksanakan	
	Jumlah fasilitas pemilihan penyedia untuk paket yang dilaksanakan pada pokja UKPBJ	
	Jumlah laporan pemilihan penyedia yang di susun	

PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA		
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang /Jasa yang terkoordinir melalui UKPBJ	
Indikator	Jumlah dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	
	Jumlah dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;	
	Jumlah dokumen Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	
	Jumlah dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola	

CASCADING KINERJA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Rp. 3.513.485.350

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
Sasaran	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel	
Indikator	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan	

KEPALA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI		
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH yang sesuai SOP	
	Persentase pelayanan informasi kegiatan KDH dan WKDH yang dipublikasikan	
Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 405.000.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.684.345.850
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 424.139.500

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOLER		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan KDH/ WKDH	
Indikator	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	
	Persentase rapat koordinasi yang difasilitasi dengan baik	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 162.155.710

SUB KOORDINATOR TATA USAHA PIMPINAN		
Sasaran	Meningkatnya Fasilitasi Penatausahaan Kegiatan KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan KDH dan WKDH sesuai SOP	
	Persentase sambutan/ pidato/ paparan KDH dan WKDH yang disiapkan dengan baik	
	Persentase agenda/ kegiatan kedinasan KDH dan WKDH yang terlaksana	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	Rp. 5.000.000
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Rp. 400.000.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.172.704.250

ANALIS TATA USAHA		
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Kegiatan KDH dan WKDH	
Indikator	Jumlah jadwal kegiatan KDH dan WKDH yang disusun	
	Jumlah Agenda Kota yang disusun	
	Jumlah Pidato/sambutan KDH dan WKDH yang disiapkan	
	Jumlah Koordinasi yang dilakukan dengan Pejabat/Perangkat Daerah	

SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI		
Sasaran	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kepala Daerah/Wakil Kepala	
Indikator	Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik	
	Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	Rp. 424.139.500
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 349.485.890

PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN		
Sasaran	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi KDH dan WKDH kepada Masyarakat	
Indikator	Jumlah peliputan dan pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	
	Jumlah pengelolaan foto/ video kegiatan KDH/WKDH	
	Jumlah penghimpunan dan penyusunan hasil liputan kegiatan atau	

PENGADMINISTRASI UMUM		
Sasaran	Terlaksananya Pengelolaan Media Informasi dan Dokumentasi KDH/WKDH	
Indikator	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang diinput dan didokumentasikan	
	Jumlah foto/video kegiatan KDH/WKDH yang diolah	
	Jumlah Surat Kabar langganan KDH/WKDH, FORKOPIMDA dan	
	Jumlah surat/ dokumen/ kelengkapan SPJ keuangan yang dikelola	

CASCADING BAGIAN UMUM

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.182.036.590

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
Sasaran	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel	
Indikator	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan	

KEPALA BAGIAN UMUM		
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase peneruhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	
Sasaran	Meningkatnya kualitas tata kelola perkantoran	
Indikator	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	
Sasaran	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas	
Indikator	Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.979.236.010
	Facilitasi Kenumahainggaan Sekretariat Daerah	Rp. 521.472.210
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.101.122.890
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Rp. 127.379.260
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.309.235.060
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 50.475.400
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 43.095.760

SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitas pelayanan kedinasan/ tamu KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase pelayanan kedinasan/ tamu KDH dan WKDH yang dilayani dengan baik	
Sasaran	Meningkatnya fasilitas pelayanan rumah tangga KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase pelayanan rumah tangga KDH dan WKDH dengan baik	
Sub Kegiatan	Facilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 740.000.270
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 243.726.700
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 426.574.580
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Rp. 94.897.630

PRAMU BAKTI		
Sasaran	Terlaksananya fasilitas tamu KDH dan WKDH	
Indikator	Jumlah pelayanan kepada tamu KDH dan WKDH dengan baik	
Sasaran	Terlaksananya fasilitas pelayanan rumah tangga KDH dan WKDH	
Indikator	Jumlah pelayanan rumah tangga KDH dan WKDH dengan baik	

SUB KOORDINATOR UMUM		
Sasaran	Meningkatnya fasilitas layanan umum	
Indikator	Persentase layanan umum yang dilakukan dengan baik	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 34.251.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp. 60.702.160
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.097.538.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 19.996.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Rp. 986.224.800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.851.175.140
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 19.490.000

PENGADMINISTRASI PERSURATAN		
Sasaran	Terlaksananya kelancaran proses surat menyurat	
Indikator	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan	
	Jumlah surat masuk yang diarsipkan	
	Jumlah surat yang dipilah berdasarkan jenjangnya	
	Jumlah surat masuk yg didisposisikan kepada atasan	

ANALIS PERENCANAAN		
Sasaran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	
Indikator	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan TV berlangganan yang dibayarkan	
	Jumlah ATK yang tersedia untuk didistribusikan	
	Jumlah laporan perjalanan dinas yang direkap	
	Jumlah administrasi tenaga perkantoran yang disiapkan	

SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN		
Sasaran	Meningkatnya pemeliharaan operasional kendaraan bermotor	
Indikator	Persentase kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dalam kondisi baik	
Sasaran	Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan Sekretariat Daerah dan	
Indikator	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	
Sasaran	Meningkatnya layanan penatausahaan barang	
Indikator	Jumlah aset yang tercatat	
Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 50.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	Rp. 43.378.760
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.365.120
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Rp. 69.212.220
	Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan	Rp. 43.095.760
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Rp. 147.075.060
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 478.410.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 449.350.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 58.167.040
	Pemeliharaan Mebel	Rp. 40.000.000
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 25.000.000
	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 149.930.000
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 50.475.400

TEKNISI ELEKTRONIK		
Sasaran	Terlaksananya pemeliharaan, pemasangan dan pemeriksaan Gedung, perlengkapan dan peralatan kantor serta rumah dinas	
Indikator	Jumlah peralatan kantor dan rumah dinas yang dipelihara, dipasang dan diperiksa	
	Jumlah peralatan kantor dan rumah dinas yang dipelihara, dipasang dan diperiksa	
	Jumlah gedung kantor dan gedung rumah dinas yang dipelihara dan diperbaiki	
	Jumlah jaringan air dan instalasi listrik yang dipelihara, dipasang dan diperiksa	

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA		
Sasaran	Meningkatnya Pengelola Barang Milik Daerah	
Indikator	Jumlah pengajuan usulan RKBMD/ RKPMD	
	Jumlah Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	
	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	
	Jumlah laporan barang yang disusun	
	Jumlah pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik	

TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		
Sasaran	Terlaksananya pemeliharaan, dan perawatan perlengkapan kantor dan rumah dinas	
Indikator	Jumlah peralatan kantor dan rumah dinas yang dipelihara, dipasang dan diperiksa	
	Jumlah perlengkapan kantor dan rumah dinas yang dipelihara	
	Jumlah paralatan rapat dinas yang disediakan	
	Jumlah instalasi listrik dan air yang terpelihara	
	Jumlah gedung kantor dan gedung rumah dinas yang dipelihara	

CASCADING BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIS DAERAH		
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	IKM	
	Nilai LPPD	
	Indek Pelayanan Publik	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 610.026.100

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
Sasaran	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan	
Indikator	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan	

KEPALA BAGIAN ORGANISASI		
Sasaran	Terwujudnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	
Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	
	Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang berorientasi pelayanan publik	
Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK	
	Persentase unit pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Baik	
Sasaran	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan LKjIP	
Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporannya dalam kategori BAIK	
Kegiatan	Penatan Organisasi	Rp. 610.026.100

SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN		
Sasaran	Meningkatnya penataan kelembagaan perangkat daerah	
Indikator	Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK	
	Persentase jabatan yang telah ditetapkan kelas jabatannya oleh KemenPAN-RB	
	Persentase usulan Produk Hukum Perangkat Daerah yang difasilitasi	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 256.933.300

PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN		
Sasaran	Tersusunnya data Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	
Indikator	Jumlah draft perwako kelembagaan yang dikumpulkan dan diketik	
Sasaran	Tersusunnya ANJAB & ABK pada organisasi Perangkat Daerah	
Indikator	Jumlah bahan penyusunan dokumen ANJAB & ABK yang dikumpulkan	
Sasaran	Teridentifikasinya kelas jabatan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	
Indikator	Jumlah jabatan yang telah diidentifikasi kelas jabatannya	

KEPALA SUB BAGIAN TATALAKSANA		
Sasaran	Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen pelayanan publik	
Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun Survey IKM sesuai pedoman	
	Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publik nya dengan kategori baik	
Sasaran	Meningkatnya pembinaan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	
Indikator	Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 182.843.700

ANALIS TATALAKSANA		
Sasaran	Terlaksananya penyusunan dokumen pelayanan publik dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	
Indikator	Jumlah hasil survey Unit Kerja yang dihimpun untuk penyusunan laporan SKM kota	
	Jumlah kelengkapan bahan penilaian unit kerja pelayanan publik yang dihimpun	
	Jumlah bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP yang dikumpulkan	
	Jumlah bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP yang dikumpulkan	
Sasaran	Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik dan ketatalaksanaan	
Indikator	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan publik dan ketatalaksanaan	

SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN DAN KINERJA		
Sasaran	Meningkatnya kepatuhan PD dalam menyampaikan dokumen pelaporan	
Indikator	Persentase Pejabat Struktural yang menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja tepat waktu	
	Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKjIP tepat waktu	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen Rencana Aksi	
	Persentase PD yang menyusun RKT tepat waktu	
Sasaran	Tersedianya Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja PD	
Indikator	Jumlah Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja PD	
Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	
Indikator	Persentase layanan administrasi kepegawaian	
Sub Kegiatan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 170.249.100

ANALIS KINERJA		
Sasaran	Terlaksananya pengumpulan bahan SAKIP tepat waktu	
Indikator	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural yang dikumpulkan tepat waktu	
	Jumlah dokumen Rencana Aksi yang dikumpulkan tepat waktu	
	Jumlah Rencana Kerja Tahunan yang dikumpulkan tepat waktu	
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LKjIP tepat waktu	
	Jumlah laporan kinerja PD yang dikoreksi	
Sasaran	Tersedianya Dokumen Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	
Indikator	Jumlah Draft Dokumen Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	
Sasaran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	
Indikator	Jumlah bahan kepegawaian yang dihimpun untuk penyusunan dokumen bezefing dan DUK	
	Persentase dokumen kepegawaian yang dikumpulkan untuk penerbitan KGB dan kenaikan pangkat	